

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DI KECAMATAN BIRINGKANAYA
KOTA MAKASSAR

WINNIE THALIA

E211 16 007



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
202



Optimized using
trial version
www.balesio.com



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : WINNIE THALIA
NIM : E211 16 007
Program studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim Penguji Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. Rakhmat, MS.
NIP 19630520 198702 1002

Pembimbing II

Adnan Nasution, S.Sos, M.Si.
NIP 19740707 200501 1001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : WINNIE THALIA
NIM : E211 16 007
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA
MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim Penguji Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Rakhmat, MS (.....)
Sekertaris Sidang : Adnan Nasution, S.Sos, M.Si (.....)
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Sulaiman Asang, MS (.....)
2. Dr. Badu Ahmad, M.Si (.....)





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WINNIE THALIA

N I M : E211 16 007

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 22 September 2020



WINNIE THALIA

E211 16 007



Kata Pengantar

Syalom

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini bisa selesai semata-mata bukan karena kuat dan perjuangan penulis, melainkan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan saja. Saat penulis meminta yang baik, Tuhan selalu memberikan yang terbaik.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan baik secara teknis maupun non teknis. Berbagai kesulitan dan kerumitan terjadi dalam proses penulisan skripsi ini namun karena adanya dukungan, doa, serta bantuan dari orang-orang terdekat memungkinkan penulis untuk lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini, karena penulis percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda tercinta Yohanes Ari dan Ibunda Tercinta Yuti Karti, tidak ada lagi kata yang mampu menuliskan betapa besar rasa terima kasih penulis untuk kalian. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, doa, dukungan, bahkan jerih lelah serta tentunya didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang membalasnya berlipat kali ganda serta dikaruniakan selalu berkat, panjang umur, rahmat, dan kesehatan dari pada-Nya.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh



u, melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan
sih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang
nberikan bantuan, teruntuk kepada :

1. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, M.Sos.,MAP selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi Fisip Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Rakhmat, MS, selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus dosen Pembimbing I penulis, yang selalu memberi motivasi, arahan dan dukungan dalam proses akademik dan penulisan skripsi ini.
3. Adnan Nasution, S.Sos, M.Si, selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta motivasi selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Sulaiman Asang, MS dan Dr. Badu Ahmad, M.Si, selaku dosen sekaligus tim penguji pada ujian proposal dan skripsi yang telah memberi masukan serta saran dalam perbaikan skripsi penulis.
5. Para Dosen dan Staff Akademik Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, dan TKSK Biringkanaya yang sudah memebrikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan terimakasih atas bantuan selama penelitian yang diberikan kepada penulis.
7. Terima kasih untuk kakak tersayang Robert Setiawan atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan. Sehat, sukses, dan semangat mengerjakan skripsinya juga. Tuhan Yesus Memberkati.
8. Seluruh keluarga besar penulis di mana pun kalian berada, terimakasih atas dukungan doa dan motivasi yang diberikan selama ini. Tuhan Yesus memberkati.
9. Terima Kasih buat Keluarga Besar PMKO FISIP UNHAS tanpa terkecuali, atas rasa kepedulian dan kekeluargaan yang sangat erat yang dibangun selama ini, teruslah menjadi garam dan terang di manapun kalian berada, Tuhan Yesus Memberkati.
10. Untuk Pengurus PMKO FISIP UNHAS Periode 2018/2019 “Baku Sayang” terima kasih atas segala pelayanan, kesabaran dan kekompakan selama proses kepengurusan. Tetaplah jadi berkat dan



pelayan bagi Tuhan, tetap menyebarkan kasih di manapun kalian berada, Tuhan Yesus Memberkati.

11. Keluarga Besar HUMANIS FISIP UNHAS. Kanda-kanda RELASI 2012, RECORD 2013, UNION 2014, CHAMPION 2015, adik-adik LEADER 2017, LENTERA 2018 dan MIRACLE 2019, yang sudah memberikan pengalaman berharga selama berorganisasi di kampus, semoga sukses selalu.
12. Terima kasih Departemen Komunikasi dan Informasi (DKI) Periode 2018/2019 atas pengalaman dan kerjasamanya dalam kepengurusan, semoga sukses selalu.
13. Teruntuk saudara-saudariku, Friendship Generation Of Administration Departemen 2016 (FRAME 16) yang penulis cintai dan banggakan selalu, terima kasih telah memberi warna dalam dunia kampus, bersama kalian penulis merasakan keluarga baru dengan segala cerita yang penuh dengan suka maupun duka, canda tawa, kebersamaan. Jadilah Frame sejati, sukses selalu dan semoga kalian wisuda tepat pada waktunya.
14. Saudari – saudariku terkasih Sunshine (Mega, Ivon, Jane, Jenika, Merlin, Melan, Yudita, Liza, Nadya) terima kasih atas kebersamaan selama ini, yang telah membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Segala kesedihan dan kebahagiaan yang di rasakan selama kuliah. Tetaplah menjadi terang yang nyata dan penyebar kasih dimanapun nanti kalian berada. Tuhan Yesus meberkati
15. Sahabat – sahabatku tercinta Bqueen (Dita, Risna, Ayu, Wiwi, Shiva, Fifi, Nadya, Fania, Amel) terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita susah, senang dalam menjalani pendidikan di kampus dan kegabutan diluar kampus.
16. Terima kasih Matsell Prianugrah M, selalu menjadi sahabat yang memberikan doa, motivasi, dan ide dalam proses penulisan skripsi ini. Sukses selalu, tetap menjadi pribadi yang baik, Tuhan Yesus memberkati.
7. Teman-teman KKN Gelombang 102, Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, atas segala pembelajaran dan kebersamaan yang pernah dilalui. Semoga sukses selalu dan sarjana



tepat pada waktunya. Congko Squad (Kak Habel, Uni, Indah, Fira, Mila, Imam, Sabnur, James).

Serta semua pribadi, kelompok dan pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik dalam proses akademik dan perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, dorongan, dukungan, motivasi, atau apapun itu dan dalam bentuk apapun itu, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yang Maha Esa yang melihat dan berkenan membalasnya berlipat kali ganda.

Penulis menyadari banyak kesalahan serta kekurangan dalam penulisan karya tulis ini, karena itu dengan senang hati penulis menerima saran atau pun kritik yang membangun guna menyempurnakan segala kesalahan yang ada.

Makassar, 22 September 2020

Penulis



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
ABSTRACK	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I Pendahuluan	1
I,1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II Tinjauan Pustaka.....	9
II.1 Konsep Kebijakan Publik	9
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
II.1.2 Karakteristik Kebijakan Publik	10
II.2 Konsep Efektivitas	11
II.2.1 Pengertian Efektivitas	11
II.2.2 Ukuran Efektivitas	13
II.2.3 Model Proses Efektivitas.....	16
II.2.4 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	18
II ² Konsep Program.....	19
Konsep Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	22
II.4.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	23
II.4.2 Dasar Hukum.....	24



II.4.3 Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	24
II.4.4 Prinsip Umum	25
II.4.5 Besaran Manfaat.....	26
II.4.6 Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	26
II.4.7 Kartu Kombo.....	26
II.4.8 Mekanisme Pelaksanaan Program BPNT	27
II.5 Kerangka Pikir	32
BAB III Metode Penelitian.....	33
III.1 Pendekatan Penelitian	33
III.2 Tipe Penelitian	33
III.3 Lokasi Penelitian.....	33
III.4 Fokus Penelitian	34
III.5 Unit Analisis	35
III.6 Sumber Data	35
III.7 Narasumber atau Informan	35
III.8 Teknik Pengumpulan Data.....	36
III.9 Teknik Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
IV.1.1 Profil Dinas Sosial Kota Makassar	40
IV.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan.....	41
IV.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Kerja	42
IV.2 Profil Kecamatan Biringkanaya.....	51
IV.2.1 Profil Kecamatan Biringkanaya.....	51
IV.2.2 Visi dan Misi Kecamatan Biringkanaya	52
IV.2.3 Kependudukan Kecamatan Biringkanaya	53
IV.2.4 Kondisi Aparatur Pemerintahan Kecamatan	54
IV.2.5 Struktur Organisasi.....	57
ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
Pemahaman Program	59



V.2 Tepat Sasaran.....	61
V.3 Tepat Waktu	64
V.4 Tercapainya Tujuan.....	66
V.5 Perubahan Nyata	70
V.6 Faktor Pendukung dan faktor Penghambat	74
BAB VI PENUTUP	76
VI.1 Kesimpulan	76
VI.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Biringkanaya	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya	57
Gambar 5.1 Basis Data Terpadu	62
Gambar 5.2 Jumlah Penerima BPNT Kecamatan Biringkanaya	68



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Berdasarkan Kepadatan Penduduk	54
Tabel 4.2 Komposisi Karyawan Kecamatan Biringkanaya	55
Tabel 5.1 Rekap Bantuan Sosial Januari 2020	69
Tabel 5.2 Hasil Penelitian Program BPNT di Kecamatan Biringkanaya	71





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Winnie Thalia (E211 16 007), Effectivity Of Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in sub-district Biringkanaya, Makassar City Supervised by Prof. Dr. Rakhmat, MS and Adnan Nasution, S.Sos, M.Si

This research intend to find out the effectivity of Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in sub-district Biringkanaya, Makassar City. This research using Sutrisno theory in (Lestari & Murti, 2015). Methods that been used in this research is qualitative research method and as for the data collection technique in this research are using interview, observe, and documentation method.

Result of this research showing that the success of Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in sub-district Biringkanaya, Makassar City is quite effective, by seeing: (1) Society comprehension about BPNT program is good enough; (2) The accuracy target of beneficiary of BPNT program is less precise due to the renewal of poor society data is not efficient yet; (3) The time accuracy of disbursement of funds BPNT program to KPM is not good due to the late distribution of assistance; (4) The aim of BPNT program has been implemented well by seeing the lack of expenditure burden and help to fulfill the food needs of Beneficiary Family; (5) The real changed that experienced by the BPNT addressee have felt well regarding to the addressee have felt the benefits of this program.

Keywords: Effectiveness, BPNT Program



Optimized using
trial version
www.balesio.com



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

Winnie Thalia (E211 16 007), Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Dibimbing oleh Prof. Dr. Rakhmat, MS dan Adnan Nasution, S.Sos, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan Teori Sutrisno dalam (Lestari & Murti, 2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sudah cukup efektif, melihat: (1) Pemahaman masyarakat mengenai program BPNT dapat dikatakan baik; (2) Ketepatan sasaran penerima bantuan program BPNT masih kurang tepat dikarenakan pembaharuan data masyarakat miskin yang belum efisien; (3) Ketepatan waktu pencairan dana program BPNT kepada KPM masih kurang baik karena sering mengalami keterlambatan penyaluran bantuan; (4) Tujuan dari program BPNT telah terlaksana dengan baik dilihat dari kurangnya beban pengeluaran dan membantu memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (5) Perubahan nyata yang dialami oleh penerima BPNT telah dirasakan cukup baik karena penerima bantuan telah merasakan manfaat dari adanya program ini.

Kata Kunci : Efektivitas, Program BPNT



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu masalah yang sangat mendasar. Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat sehingga menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional, oleh karena itu manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan pangan. Berdasarkan (Undang-Undang RI, 1996) pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pemenuhan pangan serta produksi pangan yang berkualitas bagi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang merupakan hak bagi setiap orang.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara *super power* dengan memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang melimpah. Namun, hal tersebut tidak didukung dengan skill yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola sendiri sumber daya alam mereka. Sehingga sampai saat ini sebagian sumber daya alam yang potensial dikelola oleh negara asing. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia yang kaya dengan segala potensi tetapi masih menjadi negara yang miskin di dunia. Seharusnya, Indonesia saat ini mampu membuat masyarakatnya menjadi dan tidak ada lagi pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan apabila



masyarakat dan pemerintah Indonesia mampu bekerja sama dalam mengelola sumber daya dengan baik.

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri karena disebabkan oleh kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia khususnya Indonesia. Sehingga membuat kemiskinan menjadi masalah sosial yang selalu relevan untuk dikaji hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang hadir di tengah-tengah kita dan bahkan gejala kemiskinan meningkat sejalan dengan krisis yang masih di hadapi oleh bangsa Indonesia.

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dalam (Undang-Undang, 2011) tentang penanganan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meminimalisir kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan dan peraturan yang mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Program-program penanggulangan kemiskinan didukung oleh pemerintah dengan menerbitkan (Peraturan Presiden RI, 2010) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam menanggulangi kemiskinan dan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok, pemerintah telah menerapkan kebijakan program sosial berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program diterapkan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan



masyarakat serta memberi nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan (Peraturan Presiden RI, 2017) tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada awal tahun 2017 dengan melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi oleh Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial di beberapa daerah terpilih dan telah membagikan ke 44 kota di Indonesia. Terkhusus di Kota Makassar penerima BPNT sebanyak 39.795 KPM.

Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerja sama dengan bank penyalur BPNT atau biasa disebut E-Warong (elektronik warong). Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur sesuai dengan kebutuhan di E-Warong. BPNT diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sebesar RP 110.000, yang di transfer setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik yang memiliki sistem saving account dan e-Wallet/ dompet elektronik, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial tersebut untuk membeli bahan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih atau tidak digunakan, maka dana tersebut akan secara otomatis di tabungkan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.



BPNT dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran bantuan sosial, serta mendorong keuangan inklusi.

Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota Sulawesi Selatan termasuk dalam penerima BPNT, berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Sosial jumlah penerima BPNT khususnya di Kecamatan Biringkanaya pada tahun 2018 mencapai 2.782 KPM, dan pada tahun 2019 mencapai 2.689 KPM. Jika dilihat, terdapat penurunan jumlah penerima manfaat di Kecamatan Biringkanaya. Perubahan tersebut setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan data penerima, perpindahan domisili ke wilayah lain namun masih tercatat di lokasi tempat tinggal awal, penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima program BPNT, serta status keluarga yang mengalami peningkatan atau penurunan menjadi sejahtera.

Setelah kurang lebih tiga tahun berjalannya program BPNT, kenyataannya program ini masih terdapat kurang optimal dengan perencanaan awal di Kecamatan Biringkanaya. Kurangnya kuota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga menyebabkan beberapa masyarakat miskin belum menerima program tersebut dan menimbulkan reaksi kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena beberapa warga yang semestinya masuk ke dalam komponen penerima manfaat namun tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan non tunai. Permasalahan ini menjadi alasan mengapa bantuan pangan non tunai masih belum tepat sasaran. Ketidak tepatan waktu penyaluran BPNT juga masih sering menjadi masalah yang membuat Keluarga Penerima Manfaat

rus berkorban untuk menutupi pengeluaran konsumsi rumah tangganya



Hasil penelitian (Junaidi, 2018) yang berjudul “Perbandingan Kepuasan Penerima BPNT dan Penerima RASTRA di Kabupaten Cakung, Jakarta Timur”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (RASTRA), juga untuk menganalisis apakah tingkat kepuasan penerima BPNT lebih tinggi dari tingkat kepuasan penerima RASTRA. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan penerima BPNT adalah 74,3%, sedangkan tingkat kepuasan penerima RASTRA adalah 62,9%. Pemerintah harus mengevaluasi dan meningkatkan jumlah pasokan makanan dan e-Warong dalam Program BPNT untuk meningkatkan tingkat kepuasan penerima program. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidaknyamanan dan mengurangi resiko penerima BPNT yang tidak menerima pasokan makanan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dini, 2019) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Belitung Utara Kota Bandar Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas program BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Gulak Galik dengan seringnya melakukan pembaharuan data penerima manfaat program serta pemberian pelayanan dan penginformasian program lebih maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan, 2019) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Glugur Kota Medan Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui s pelaksanaan Program BPNT terhadap kesejahteraan keluarga miskin.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program BPNT Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini didasari dengan adanya pendataan dan survey yang merupakan bagian dari strategi program sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga masyarakat mendapatkan bantuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga miskin dalam aspek tingkat pendapatan dan ketahanan pangan.

Adanya program pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Efektivitas pelaksanaan program BPNT tidak bisa dilihat secara parsial hanya berdasarkan pada kinerja instansi tertentu saja. hal tersebut dapat dilihat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam (Lestari & Murti, 2015) yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pelaksanaan program yang efektif dapat dilihat dari penerapan selama ini yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, terutama berkaitan dengan pelaksanaan program BPNT karena dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, yaitu dilihat dari bagaimana masyarakat dapat memahami kegiatan program itu, apakah suatu program tepat sasaran bagi masyarakat, waktu dan pelaksanaan program yang telah diatur serta pencapaian tujuan yang berorientasi pada perubahan yang nyata bagi masyarakat.



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan masih terdapat masalah terkait pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota

Makassar. mengingat pentingnya program ini dalam upaya memberantas kemiskinan sehingga perlu upaya pelaksanaan yang efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam dalam wujud penelitian dengan judul

“Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar”

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?
2. Faktor-faktor penghambat & pendukung efektivitas Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat & pendukung efektivitas Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar



I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai landasan teoritis dan memberikan wawasan yang luas bagi civitas akademika khususnya tentang efektivitas suatu pelaksanaan program yang berorientasi pada pemerintah dibidang kebijakan publik.

2. Secara praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan dari berbagai pihak khususnya kepada penyelenggara program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Makassar. sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan seperti yang diharapkan oleh masyarakat untuk menekan angka kemiskinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan Publik

II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana bagaimana persoalan tersebut masuk ke agenda kebijakan.

Menurut Dye dalam (Subarsono, 2005) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sedangkan James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah

Menurut James E. Anderson dalam (Suwitri, 2008) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan



masalah tertentu. Dengan demikian, menurut Anderson, tugas utama dari pemerintah adalah membina dan mengatur kedua jenis lingkungan agar tetap harmonis dan mengarahkannya menuju pada pencapaian

yang ingin dicapai. dengan demikian pemerintah harus berupaya mempertimbangkan berbagai hambatan dan peluang dalam rangka pencapaian tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan publik merupakan suatu konsep tersistematis yang manjadi acuan pelaku kebijakan untuk mencapai suatu tujuan.

II.1.2 Karakteristik kebijakan publik

Menurut (Wahab, 2004) menjelaskan ciri-ciri kebijakan publik meliputi :

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan;
- b) Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri;
- c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu;
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif mungkin pula negat.

Sedangkan, menurut (Agustino, 2008) kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak;
- b) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah;



- c) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur bidang-bidang tertentu, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan;
- d) kebijakan publik bersifat positif maupun negative;
- e) kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik melihat sinkronisasi yang ideal dan baik antara kebijakan publik, pelaku kebijakan, serta lingkungan dimana kebijakan itu diterapkan. dengan demikian, proses pencapaian tujuan secara bertahap yang telah di susun di dalam suatu kebijakan publik dapat dijalankan dengan baik.

II.2 Konsep Efektivitas

II.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris “effective” artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran kegiatan atau program yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Dapat dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini didukung oleh pendapat menurut (Sumaryadi, 2005), mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.



enurut James L.Gibson dkk dalam (Tiara Rohana, 2019), mengatakan “efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan sasaran efektivitas”

selanjutnya Tjokroamidjojo mengatakan bahwa, “efektivitas agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil”.

Menurut H. Emerson dalam (Iqbal, 2018) yang menyatakan bahwa: *“Effectiveness is a measuring in tern of attaining prescribed goal or objectives* (efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya)”. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Tingkat efktivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan pelaksanaan maupun hasil dari program.

Sedangkan menurut Georgopolous dan Tannembraum dalam (Steers, 1985) mengemukakan bahwa, “efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan – tujuan organisasi.

Menurut Salim dalam (Dini, 2019) “Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”.



Menurut Hadayaningrat dalam (Lestari & Murti, 2015) mengemukakan bahwa efektifitas merupakan suatu pengukuran dimana target telah tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Menurut (Steers, 1985) “Efektivitas adalah sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya, efektifitas paling mudah dipakai bila dipandang dari sudut pencapaian tujuan optimum yakni efektifitas organisasi dapat dipandang sebagai batas kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan operasi dan operasionalnya”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan sebuah ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Dapat dikatakan efektif apabila seluruh komponen yang menjadi tujuan organisasi atau sebuah program telah terpenuhi. Mengukur efektifitas program ditentukan oleh tepat atau tidaknya sasaran yang ingin dicapai serta hasil apakah yang diperoleh dengan adanya program tersebut.

II.2.2 Ukuran Efektivitas

Menurut Ducan dalam (Steers, 1985), terdapat 3 indikator yang mempengaruhi efektifitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan : adalah suatu proses yang merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan “ketahui apakah tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator dari pencapaian tujuan ini yaitu: (1) Kurun waktu (2) Sasaran dan (3) Dasar Hukum.



2. Integrasi : Yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu (1) Prosedur dan (2) Proses Sosialisasi.
3. Adaptasi : adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyalurkan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator yaitu : (1) Peningkatan Kemampuan dan (2) Sarana dan Prasarana.

Menurut Gibson, dkk dalam (TOAD, V. S., RARES, J., & POMBENGI, 2018) indikator efektivitas dapat diukur :

- 1) Produksi, yaitu keberhasilan melaksanakan dan menghasilkan jumlah dan mutu kerja (program/kegiatan) yang direncanakan/ditetapkan sebelumnya.
- 2) Efisiensi, yaitu rasio hasil kerja dengan sumber-sumber yang digunakan (biaya, tenaga, waktu).
- 3) Kepuasan, yaitu kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya, yang nampak pada sikap pegawai, kehadiran/absensi, dan keluhan.
- 4) Adaptasi/fleksibilitas, yaitu kemampuan organisasi menanggapi perubahan dan perkembangan tugas.
- 5) Perkembangan, yaitu perkembangan atau kemajuan kemampuan organisasi mencapai target hasil yang ditetapkan.



Menurut (Budiani, 2005) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut

- 1) Ketetapan sasaran program : sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi Program : kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan Program ; sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan Program : kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Untuk mengukur efektivitas menurut Sutrisno dalam (Lestari & Murti, 2015) mendefinisikan hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

- 1) Pemahaman Program : dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
- 2) Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan
- 3) Tepat Waktu : dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.



tercapainya tujuan ; diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

- 5) Perubahan nyata : diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata masyarakat setempat.

II.2.3 Model Proses Efektivitas

Model ini menekankan proses-proses pokok yang berhubungan dengan efektivitas, dan tidak memandang efektivitas sebagai keadaan akhir. Dengan demikian model ini mengakui bahwa baik organisasi maupun lingkungannya terus berubah. Menurut (Steers, 1985) terdapat tiga dimensi utama model ini, sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Tujuan

Nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasilnya dengan tujuan organisasi. Optimalisasi tujuan mengakui kenyataan bahwa sebagian besar organisasi tidak dapat “memaksimalkan” tujuan tertentu sekalipun mereka menghendaknya. Sebaliknya, berdasarkan pengakuan akan adanya faktor-faktor pembatas terhadap tingkah laku dan prestasi organisasi, para manajer yang efektif dianggap menentukan dan mengejar tujuan yang optimal (yaitu, tujuan yang diinginkan yang telah dibatasi atau dimodifikasi oleh sumber daya yang tersedia). Jadi, optimalisasi adalah sarana pengimbang berbagai tujuan yang bertentangan, sehingga setiap tujuan menerima cukup perhatian dan sumber daya selaras dengan tingkat kepentingannya bagi organisasi. Diutamakan di sini bahwa efektifitas harus dinilai terhadap tujuan yang bisa dilaksanakan, dan bukan terhadap konsep tujuan yang maksimum.



2. Perspektif Sistem

Penggunaan perspektif menekankan pentingnya arti interaksi organisasi lingkungan. Perspektif sistem ini memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi. Jika hubungan ini dikenal dengan jelas, akan lebih mudah bagi manajer mengambil tindakan tegas untuk memperlancar pencapaian tujuan berkat bertambahnya pengertian mereka mengenai dinamika organisasi.

3. Tekanan pada Perilaku

Aspek terakhir adalah tekanan pada pengertian mengenai peranan perilaku manusia dengan pengaruhnya pada prestasi organisasi. Dengan kata lain, jika para anggota organisasi menyetujui sasaran pemimpin mereka, maka dapat diperkirakan bahwa tingkat usaha yang mereka tujukan untuk mencapai sasaran-sasaran akan tinggi. Di pihak lain, jika sasaran organisasi sebagian besar tidak cocok dengan kebutuhan dan tujuan pekerja, sulit untuk percaya bahwa mereka akan memaksimalkan kontribusi mereka. Jadi, bila kita membahas efektivitas organisasi yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas adalah hubungan antara apa yang diinginkan para pekerja dengan apa yang diinginkan organisasi.



II.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Menurut (Steers, 1985) mengidentifikasi empat variable yang berhubungan dengan efektivitas, sebagai berikut:

1. Karakteristik Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi. Walaupun produktivitas dan efisiensi cenderung mempunyai hubungan yang positif dengan beberapa variable struktur ini tetapi sikap kerja (khususnya kepuasan kerja dan keikatan) cenderung mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan produktivitas dan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa para manajer bertanggung jawab mengidentifikasi dengan jelas tujuan pokok mereka dan mengendalikan perilaku individu tersebut.

2. Karakteristik Lingkungan

Lingkungan dalam dan lingkungan luar organisasi juga berpengaruh atas eektivitas. Lingkungan luar meliputi hukum, ekonomi, dan pasar dimana organisasi berusaha mendapatkan sumber daya dan mendistribusikan keluarannya. Lingkungan dalam meliputi kebudayaan dan sosial yang sangat menentukan perilaku pekerja.

3. Karakteristik Pekerja



aktor pengaruh yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu. Pada kenyataannya, para anggota organisasi merupakan faktor

pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Kesadaran akan perbedaan sikap pribadi di antara para pekerja sangat penting bagi para manajer untuk memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda atas usaha untuk mencapai tujuan.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Telah diidentifikasi beberapa mekanisme khusus para manajer meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penetapan tujuanstrategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan adaptasi dan inovasi organisasi.

II.3 Konsep Program

Program merupakan salah satu unsur penting dalam merencanakan suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih mudah dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yakni :

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Menurut Terry dalam (Mulyadi, 2015) menyatakan mengenai program sebagai berikut :



A program can be defined as a comprehensive plan that includes future different resources in an integrated pattern and establish a sequence of action and time schedules for each in order to achieve stated objectives. e up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, s and budgets". (Program merupakan rencana yang bersifat

komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran).

Kayatomo dalam (Djabbar Ramlawati, 2013) menyatakan bahwa program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan.

Menurut Charles O. Jones dalam (Anas, 2017) pengertian program adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga dapat diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri yang apabila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik

Program yang baik menurut Jones adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas yakni, sebelum menentukan masalah sosial yang akan diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius mengenai bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi dan solusi terbaik apa yang nantinya akan diambil.

Selanjutnya, Grindle dalam (Mulyadi, 2015) menjelaskan bahwa isi program menggambarkan; "kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change*), status pembuatan keputusan (*site of decision making*), pelaksana



program (program implementers) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)”.

Menurut S.P. Siagian dalam (Mulyadi, 2015) mengemukakan bahwa perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dari kegiatan.

Dengan demikian, dapat dilihat program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sasaran yang dikehendaki,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta jumlahnya,
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam (Pratama & Fauzi, 2018) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.



engukuran dengan ongkos - ongkos yang diperkirakan dan keuntungan
untung yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.

5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembagunan dan program pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai program di atas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu cara yang dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi.

II.4 Konsep Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dalam bidang penanggulangan kemiskinan serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Penyaluran bantuan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung produktifitas penerima bantuan dan meningkatkan transparansi program serta kemudahan mengontrol dan meminimalisir penyimpangan.

Penyaluran bantuan pangan non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2007 di beberapa daerah terpilih dan telah membagikan ke 44 kota di Indonesia, termasuk di Kota Makassar dengan penerima BPNT mencapai 50 ribu orang. Dengan demikian bantuan pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau kartu keluarga

.(Kemensos.go.id, 2019)



Dengan demikian, Program Bantuan pangan secara tunai dibentuk untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan bagi keluarga miskin dengan lebih mengutamakan pencapaian prinsip 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi) sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan konsumsi pangan.

Implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) telah diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden. Pedoman pelaksanaan ini juga digunakan sebagai dasar atau arahan oleh pelaksana program, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank penyalur bantuan, e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan. (Kementerian Sosial & dkk, 2017)

II.4.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang bekerjasama dengan bank. Program BPNT merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Renstra yang akan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong keuangan. Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap mulai tahun



2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai.

II.4.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan. Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

II.4.3 Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan Program Bantuan Pangan Non tunai adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan pangan bagi KPM;



4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
5. Mendorong Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

II.4.4 Prinsip Umum

Prinsip Umum Program Bantuan Pangan Non tunai adalah sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM;
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai referensi;
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM;
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.



II.4.5 Besaran Manfaat

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp 110.000,-/ Keluarga Penerima Manfaat / bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-waong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun Elektronik Bantuan Pangan.

Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi.

II.4.6 Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sasaran BPNT adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, dan namanya termasuk di dalam Daftar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.

II.4.7 Kartu Kombo

Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran BPNT kepada KPM adalah Kartu Kombo.



1. Kartu Kombo digunakan sebagai identitas KPM dan berfungsi sebagai uang elektronik dan tabungan, sehingga pada saat pengambilan bantuan sosial perlu dibawa oleh KPM.
2. Kartu Kombo menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan, jika tidak digunakan/dicairkan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang, dana tersebut akan terakumulasi. Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan tidak dapat dicairkan tunai.
3. Pada Kartu Kombo tertera nama penerima, nomor peserta, nama Bank Penyalur, dan nomor pengaduan.

II.4.8 Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

1. Tahap Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan Bank Penyalur BPNT.

a. Koordinasi di tingkat pemerintah pusat

Koordinasi di tingkat pemerintahan pusat dilakukan antara kementerian/lembaga pelaksana program dengan lembaga terkait. Koordinasi dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran Program BPNT, Kemenko PMK selaku Ketua Tim Koordinasi Rastra dan BPNT, Bappenas, kantor Staf Presiden (KSP), TNP2K, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI). Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan basis hukum,



mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

b. Koordinasi di tingkat Pemerintahan Kota

Pemerintah kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan kelurahan untuk seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta hingga penanganan pengaduan masyarakat.

Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing kelurahan serta memastikan keterlibatan petugas kelurahan dalam proses tersebut.

Pemerintah kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, sosialisasi, kemudahan perizinan, keringanan biaya, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persiapan E-Warong

Berdasarkan Perpres No.63 tahun 2017, agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM.

2. Tahap Sosialisasi dan Edukasi

- 1) Sosialisasi dan edukasi BPNT dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya KPM mengenai tujuan dan mekanisme pemanfaatan BPNT serta saluran pengaduannya.



- 2) Sosialisasi dan edukasi BPNT juga diberikan kepada E-Warong agar mampu melayani pemanfaatan BPNT E-Warong, sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, dipasang stiker logo khusus sebagai penanda bagi KPM.
- 3) Pelaksana sosialisasi dan edukasi BPNT adalah Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial, aparat daerah, serta Bank Penyalur.
- 4) Instrumen sosialisasi dan edukasi menggunakan berbagai media seperti rapat koordinasi, pedoman umum dan petunjuk teknis, surat edaran dari kementerian/lembaga negara terkait, dan poster/brosur.
- 5) Sasaran edukasi dan sosialisasi BPNT adalah Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial Bansos Pangan, aparat desa, KPM, dan E-Warong.

3. Tahap Registrasi/Distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)

- 1) Bank Penyalur melakukan registrasi atau pembukuan tentang rekening secara kolektif berdasarkan data KPM yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- 2) Bank Penyalur dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial melaksanakan distribusi KKS dan Kelengkapannya kepada KPM yang telah dibukakan rekening. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada KPM.
- 3) KPM mendapatkan pemberitahuan terkait kepesertaannya dalam program BPNT dan terkait proses registrasi/distribusi KKS.



- 4) pada proses registrasi/distribusi KKS, calon KPM membawa kartu/dokumen identitas diri untuk dilakukan pencocokan dokumen sebelum KKS dibagikan.
- 5) Saat registrasi, Bank Penyalur juga memberikan informasi kepada KPM mengenai lokasi E-Warong yang dapat diakses dan meminta KPM untuk melakukan pengecekan saldo KKS di E-Warong.
- 6) Dalam hal ini ditemukan data KPM yang tidak sesuai (berupa kesalahan penulisan nama, NIK atau alamat) pada saat pelaksanaan registrasi, maka KPM dimaksud harus menyertakan dokumen tambahan berupa surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.

4. Tahap Penyaluran BPNT

Transfer manfaat BPNT dari Bank Penyalur ke rekening KPM BPNT dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

5. Tahap Pemanfaatan

- 1) KPM datang ke E-Warong dengan membawa KKS dan Kartu Identitas Diri
- 2) KPM melakukan cek saldo bantuan yang tersedia pada KKS di mesin EDC dengan memasukkan kode rahasia (PIN) KKS dan akan menerima bukti transaksi pengecekan saldo dana pada KKS.
- 3) Jika saldo pada KKS mencukupi, KPM dapat melakukan pembelian bahan pangan (sesuai permintaan KPM) dengan memasukkan PIIN KKS ada mesin EDC bank.
Setelah transaksi berhasil KPM dapat menerima bantuan pangan disertai bukti transaksi.



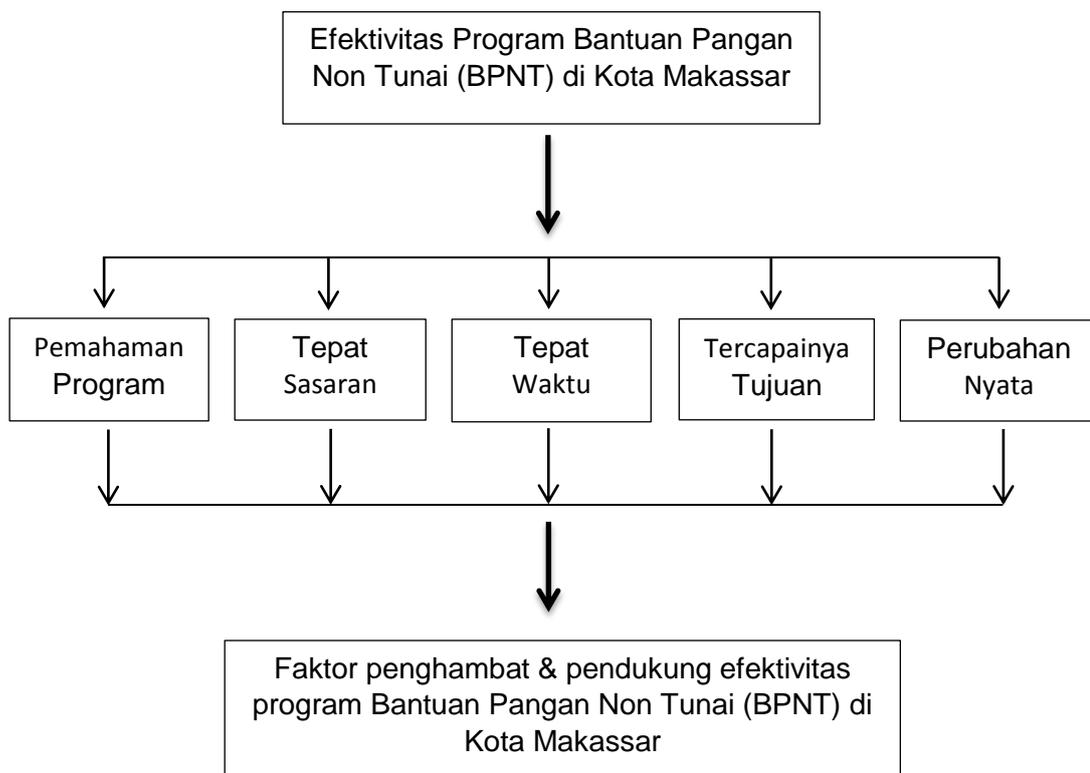
- 5) Saldo yang ada pada KKS KPM akan berkurang sesuai dengan nilai BPNT (pembelian beras dan/atau telur).
- 6) Hal-hal yang perlu diperhatikan :
 - KPM tidak dikenakan biaya dalam melakukan pemanfaatan BPNT.
 - KPM dilarang bertransaksi dengan KKS (menggesekkan KKS pada mesin EDC) tanpa disertai penyerahan bantuan pangan kepada KPM secara langsung.

Dengan demikian dapat disimpulkan, program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan memberikan manfaat yang nyata dalam pemenuhan pangan setiap bulannya. Program BPNT dibentuk untuk menggantikan program yang sebelumnya yaitu Rastha yang masih dianggap kurang dalam menerapkan prinsip 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi) sehingga pada tahun 2017 program BPNT mulai diselenggarakan oleh pemerintah. Agar program BPNT berjalan sesuai dengan tujuannya maka peran dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dapat terkoordinasi dengan baik, sistem pendataan yang terperinci, dan proses penyaluran berjalan dengan semestinya. adapun pihak yang terkait dalam melaksanakan program BPNT di Kota Makassar yaitu Dinas Sosial Kota Makassar sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan. (Kementerian Sosial & Dkk, 2019)



II.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan dari permasalahan dan dukungan dari tinjauan pustaka maka peneliti membuat kerangka pikir dengan menggunakan teori Sutrisno dalam (Lestari & Murti, 2015). Hal ini dilakukan untuk menjelaskan sejauh mana efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Biringkanaya.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

